

Rebranding Balitbanghub Menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT)

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh organisasi yang responsif, adaptif dan inovatif. Selain hal tersebut, kapasitas dan kapabilitas teknis dalam lingkup subsektor perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut dan perhubungan udara, bahwa Kementerian Perhubungan telah memiliki 3 (tiga) fokus utama transportasi yaitu konektivitas, pelayanan, dan keselamatan. Oleh karena itu, dalam mengemban pelaksanaan tugas tersebut diperlukan kebijakan transportasi yang bersifat holistik dan integratif, baik pada tingkat direktif, strategis, taktikal, maupun operasional.

Kebijakan transportasi yang tepat sangat diperlukan di bidang perhubungan, dikarenakan bidang perhubungan merupakan hal yang kompleks dan memerlukan tingkat analisis tinggi diikuti dengan tingkat perubahan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis. Untuk itu, Kementerian Perhubungan perlu di dukung oleh unit kerja yang dapat memberikan analisis dan rekomendasi kebijakandi bidang transportasi untuk menghadapi tantangan yang ada saat ini dan mengantisipasi perkembangan teknologi khususnya pada era 4.0 dan kedepan 5.0.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan bermaksud untuk melakukan penguatan kelembagaan dalam analisis rekomendasi kebijakan dan dukungan pengambilan keputusan dan norma, standart, pedoman, dan kriteria di bidang transportasi. Langkah penguatan tersebut telah dilakukan dengan transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT).

Visi dan Misi BKT

Visi

Badan Kebijakan Transportasi sebagai pusat unggulan (*Center of Excellent*) terpercaya dalam Analisis dan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Antisipatif dan Responsif guna mendukung terwujudnya visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Misi

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan transportasi secara holistik, integratif, tematik, sapsial (HITS);
2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (*evidence and knowledge based policy*);
3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi;
5. Penguatan SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan lembaga dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

Tugas dan Fungsi BKT

Tugas

Menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi.

Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
3. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) di bidang transportasi;
4. Pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Transportasi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Peran dan Kontribusi BKT

Peran BKT

1. BKT sebagai *Government Think Tank*:

Dukungan pengambilan keputusan strategis dalam lingkup: decision making influence, academic influence, social influence, international influence, optimization influence.

2. BKT sebagai *Central Strategy Unit*:

Kajian strategis lintas sektor, keluaran: *Masterplan, Roadmap*, rekomendasi pada tingkat strategis (*policy brief, policy action*), Pengembangan model kebijakan transportasi bersifat strategis-prospektif;

3. BKT sebagai *Central Policy Unit*:

Sebagai *Focal Point* dalam pengembangan dan perumusan kebijakan transportasi; Sebagai “penjamin kualitas/QA” atas substansi dan harmonisasi kebijakan transportasi;

4. BKT sebagai *Flexibel Pool*:

Memberikan dukungan/layanan berbasis “kepakaran” dalam perumusan kebijakan yang bersifat sistemik (holistik dan integratif);

Analisis dan manajemen risiko (*ex-ante, on-progress, ex-post*) atas perumusan dan implementasi kebijakan.

Kontribusi BKT

1. *Government think-tank*, yaitu memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan perhubungan (decision support system), dan penugasan khusus dari Pimpinan;

2. Analisis dan pengembangan kebijakan arah pengembangan strategis dalam pembangunan perhubungan yang bersifat holistik-integratif (*cross-cutting issues*);

3. Analisis dan rekomendasi multi-perspektif bagi peningkatan konektivitas dan efektivitas transportasi bagi pembangunan berbasis THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial);

4. Rekomendasi pengembangan bagi peningkatan kinerja dan nilai tambah publik dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan secara terintegrasi

Perumusan Kebijakan BKT Mencakup 4 Aspek Utama

1. Teknologi Informasi/Digitalisasi
Rumusan kebijakan yang adaptif dan visioner terhadap perkembangan teknologi sarana dan prasarana transportasi (*Early Warning System*, Sistem Pelayanan Terintegrasi)
2. Evaluasi Kelembagaan & Regulasi
Rumusan kebijakan yang berbasis pada pola kelembagaan dan penerapan regulasi yang efektif (Unit Pelaksana Teknis, Badan Penyelenggaraan Transportasi)
3. Skema Pendanaan Kreatif
Rumusan kebijakan yang berorientasi pada pendanaan pembangunan sektor transportasi yang efisien (KPBU, Optimalisasi Pemanfaatan BMN, PNBPN, *Sovereign Wealth Fund/SWF*)
4. SDM Transportasi Kompetitif
Rumusan kebijakan yang mampu menyelaraskan antara kompetensi SDM transportasi dengan kebutuhan di lapangan (*Link & Match* SDM Transportasi)

Posisi BKT Dalam Siklus Kebijakan/Regulasi

1. Perumusan
 - Analisis & Evaluasi Terhadap Kebijakan /Regulasi yang telah berjalan & lingkungan strategis
 - *Grandplan* Kebijakan Sektor Transportasi (basis kebijakan/regulasi baru)
2. Pengesahan/Pengundangan/ Penyebarluasan
3. Pelaksanaan dan Pengawasan
4. Evaluasi
 - Evaluasi menyeluruh terhadap proses perumusan kebijakan/regulasi (dengan fokus utama dampak penerapan regulasi/kebijakan dilapangan)
 - Penyempurnaan proses bisnis (*self assessment*)

Output yang dihasilkan oleh BKT berupa rekomendasi Kebijakan yang mencakup :

1. *Policy Paper/* Naskah Akademik*.
2. Draft UU, PP, PM (Baru maupun amandemen).
3. Evaluasi Kemanfaatan Program Pembangunan.

Outcome yang dihasilkan oleh BKT berupa:

Kebijakan dan Regulasi Bidang Transportasi yang adil dan memberikan nilai tambah untuk bangsa dan negara